

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KOTA BLITAR
JI. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LkjIP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*). Dengan acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna, menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 26 Februari 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar



PARMINTO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197106121993011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksnaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industri
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL,MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada :

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan Produktivitas industri

3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
---	---	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 2 sasaran strategis/ kinerja utama, yaitu:

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 9,02 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 360,8 % dengan kategori berhasil, yang berasal dari perhitungan target 2,5 % dengan realisasi sebesar 9,02 %.

II. Meningkatnya Produktivitas Industri

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 8,90 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 445% dengan kategori berhasil, yang berasal dari perhitungan target 2,5 % dengan realisasi sebesar 8,90%.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perindustrian dan Perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya, namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya:

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi.

- b. Dalam rangka pengembangan pasar rakyat yang presentatif dan menindaklanjuti penyusunan dolumen yang ada maka perlu adanya anggaran revitalisasi pasar wage.
- c. Belum ada data perdagangan berbasis digital
- d. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuainya branding produk dengan pangsa pasar
- e. Karena masih adanya ijin usaha dan industri kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- f. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar

strategi yang harus ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan dimasa mendatang yaitu antara lain:

- a. Tahun 2026 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi.
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang di seluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait.
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi ramai lagi.
- f. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang.
- g. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI.
- h. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	11
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025	16
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 – 2025	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	24
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	28
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029	
2. Rencana Kinerja Tahun 2026	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renja yang merupakan dokumen tahunan perangkat Daerah. LKJIP dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 ini sebagai dokumen evaluasi kinerja tahun 2025 sekaligus sebagai evaluasi atas capaian akhir masa jabatan Walikota dan wakil Walikota (sampai dengan 2025 pada urusan Perindustrian dan Perdagangan).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerjanya.

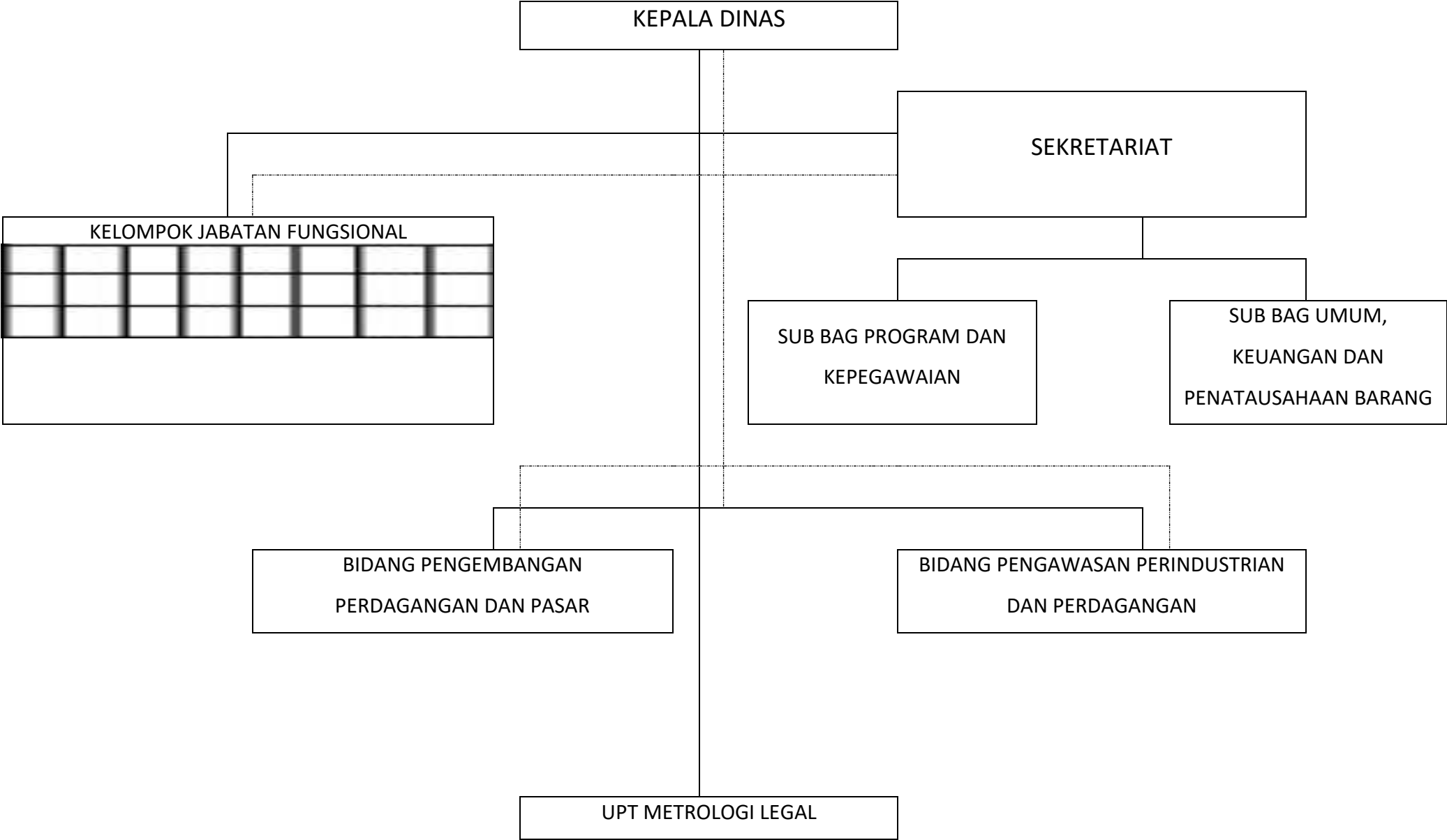
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;

- f. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. Perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksnaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industry;
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun

2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar :

1. Kota Blitar mempunyai 11 pasar rakyat yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya
2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa. Usaha perdagangan memberikan pengaruh positif terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan sektor perdagangan dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian.
3. Banyaknya potensi industri kecil yang dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar.

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar antara lain :

1. Peningkatan Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standar pelayanan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar
3. Pembinaan dan penataan PKL sesuai Perwali dengan melibatkan OPD terkait (LKJIP)

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021- 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman industr pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan ndustryri. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada:

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan industri kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima ndust dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM
1	2		3	4	5
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB		24,90	%	
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		9,91	%	
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{(Volume\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Volume\ usaha\ tahun\ (n-1))/ Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	2,25	%	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	$\{(Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1))/ Jumlah\ nilai$	2,00	%	• Program Perencanaan dan

		produksi industri tahun (n-1)} x 100 %			Pembangunan Industri
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun n	86,05		• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	128,971,500.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	180,743,900.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4,800,968,570.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,867,159,641.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,422,244,690.00	Dana Alokasi Umum (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		16,400,088,301.00	

C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Tahun 2025 seluruh pasar rakyat belum mendapatkan	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat	- Program peningkatan sarana distribusi	√		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	anggaran pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi	b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan revitalisasi pasar legi.	perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan			
2	Belum terlaksananya pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√		
3	Belum dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan pemberdayaan sarana	√		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			distribusi perdagangan			
4	Belum mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegehan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan evaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegehan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√		
5	Belum mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi ramai lagi	Melaksanakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi ramai lagi	- Program peningkatan sarana distribusi perdaganga - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√		
6	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama	- Program Perencanaan dan Pembanguna n Industri - Kegiatan	√		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan memberikan bantuan peralatan produksi	dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan juga tetap memberikan bantuan peralatan produksi	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			
7	Belum dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	√		
8	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan	√		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdaya an industri dan peran serta masyarakat			

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari:
 - Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025
 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023– 2025
 - Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Daerah lain (Target SPM)
2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari:
 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase
tingkat capaian

=

Realisasi

Rencana

x 100%

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Standar Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	24,90	23	92,36
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	9,91	9,91	100
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	%	2,5	9,02	360,8
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	2	8,90	445
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86,05	85,76	99,66

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Sesuai Perjanjian Kinerja 2025 terdapat 4 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 4 sasaran strategis, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis yang pertama ini diukur dengan persentase peningkatan voume usaha perdagangan, capaian indikator kinerja dapat diukur dengan

Formulasi = {((Volume usaha perdagangan tahun n - Volume usaha perdagangan tahun (n-1))/ Volume usaha perdagangan tahun (n-1))} x 100 %

= {(2.129.472.138.201 – 1.953.222.307.610)/ 1.953.222.307.610} x 100 %

= 9,02 % (Sumber data : Disperindag Tahun 2025 Kota Blitar)

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 9,02 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 360,8 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2,5 % dengan realisasi sebesar 9,02 %.

Nilai Volume usaha Perdagangan	Tahun 2024	Tahun 2025
Omset	1.918.063.275.206	2.129.472.138.201

Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi.
- b. Dalam rangka pengembangan pasar rakyat yang presentatif dan menindaklanjuti penyusunan dolumen yang ada maka perlu adanya anggaran revitalisasi pasar wage.
- c. Belum ada data perdagangan berbasis digital.

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, terutama untuk pasar legi agar mendapatkan anggaran revitalisasi.
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018.
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018.
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar”

II. **Meningkatnya Produktivitas Industri**

Dalam sasaran strategis yang Kedua ini, capaian indikator kinerja dapat diukur dengan

formulasi = {(Jumlah produktivitas industri tahun n - Jumlah produktivitas industri tahun (n-1))/ Jumlah produktivitas industri tahun (n-1)} x 100 %

= {(919.558.083.584-844.366.054.000)/ 844.366.054.000} x 100 %

= 8,90 % (Sumber data : Disdagin Tahun 2025)

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 8,90 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 445 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2 % dengan realisasi sebesar 8,90 %.

Produktivitas Industri	Tahun 2024	Tahun 2025
Hasil produksi	832.708.141.000	919.558.083.000

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuainya branding produk dengan pangsa pasar
- b. Karena masih adanya ijin usaha dan industri kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- c. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang
- b. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
- c. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi

Tabel. 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	%	86,75	90,52	104,35
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		perangkat daerah yang sesuai standart				
4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah sesuai standar	%	100	100	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	100
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	100
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase barang penting yang diawasi	%	100	100	100
2	Keg pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	%	100	100	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	%	100	100	100
III	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	50	62,94	125,88
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera sah	unit	5900	4402	74,61
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM	%	5	5,62	121,40
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	%	5	5	100
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	73,5	81,82	111,32
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	%	80	80	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	6	6	100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023– 2025

Tabel. 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,75%	25,03%	24,80%	24,69%	24,90%	23%
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,79%	9,85%	9,83%	9,91%	9,91%	9,91%
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2%	2,22%	2,25%	-1,83%	2,25%	9,02%
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	1%	1,072%	1,5%	1,4%	2%	8,90 %
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	85,01	85,02	86,05	86,05	85,76

Dapat dilihat untuk IKU pertama dan kedua mengalami peningkatan yaitu peningkatan volume perdagangan dan peningkatan produktivitas industri. Dan untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah mengalami penurunan nilai SAKIP dimana pada tahun 2024 sebesar 86,05 dan pada tahun 2025 menjadi 85,76

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel. 3.5. Perbandingan realisasi kinerja s/d 2025 dengan target akhir renstra

Tujuuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026 (%)	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	2	5	6	7
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	23%	24,9%	92,36%
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,91%	9,95%	99,59%
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	9,02%	2,5%	360,8%
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	8,90 %	2%	445%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,76	86,05	99,66

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan tahun 2025 dengan realisasi 9,02 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami peningkatan sebesar 360,8 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya produktivitas industri dari target Renstra 2 % telah tercapai 8,90 % dan mengalami peningkatan sebesar 445 %. Dan untuk kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2025 sebesar 86,05 juga sudah mengalami kemajuan sebesar %.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Disperindag Kota Blitar dengan Diskopindag Kota Malang
Tahun 2025

KOTA BLITAR				KOTA MALANG			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pertumbuhan usaha	Persentase peningkatan volume	2,5%	9,02 %	Meningkatnya daya saing dan jangkauan	Persentase produk unggulan yang	2,00%	3,50%

KOTA BLITAR				KOTA MALANG			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
perdagangan	usaha perdaganga n			pemasaran produk unggulan, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional	berdaya saing		
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	2%	8,90 %	Meningkatnya daya saing industri	Persentase IKM berdaya saing	43,00%	46,06%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,05	85,76	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	82,95	82,95

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 5 (lima) program dan 14 (Sebelas) kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 17.329.022.414,00 dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Belanja untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.115.355.146	7.564.072.928	93,21
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5.494.500	5.241.450	95,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.347.951.161	5.978.789.309	94,18
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.924.700	72.574.500	55,86
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.860.496	375.359.428	99,87
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.477.424,90	704.476.064	88,45
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.986.700	269.817.648	89,64
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.355.235.454	4.943.249.059	92,31

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
7	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.013.985.654	4.614.333.959	92,03
8	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	341.249.800	328.915.100	96,39
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	202.713.400	193.318.359	95,37
9	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	132.209.800	125.904.769	95,23
10	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	60.603.600	60.263.590	99,44
11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.900.000	7.150.000	72,22
IV	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	107.040.900	106.514.900	99,51
12	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan	107.040.900	106.514.900	99,51
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.548.677.514	3.022.927.547	85,18
13	Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	3.548.677.514	3.022.927.547	85,18
	JUMLAH	17.329.022.414	15.830.082.793	91,35

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.8. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	5.664.989.754	32,69
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	3.548.677.514	20,48
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8.115.355.146	46,83
JUMLAH		17.329.022.414	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 15.830.082.793 dari total anggaran sebesar Rp. 17.329.022.414 atau sebesar 91,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2025 termasuk “sangat berhasil”.

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,5	9,02	360,8	5.664.989.754	5.243.082.318	92,55
Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	2	8,90	445	3.548.677.514	3.022.927.547	85,18
Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,05	85,76	99,66	8.115.355.146	7.564.072.928	93,21

Dari tabel diatas, Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa:

- Sasaran 1 : “Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan” persentase capaian kinerjanya mencapai 360,8% dengan persentase capaian anggaran sebesar 92,55%.
- Sasaran 2 : “Meningkatnya produktivitas industri” persentase capaian kinerjanya mencapai 445% dengan persentase capaian anggaran sebesar 85,18%
- Sasaran 3 : “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 99,66% dengan persentase capaian anggaran sebesar 93,21%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	360,8	92,55	3,89
Meningkatnya produktivitas ndustry	Persentase peningkatan produktivitas industri	445	85,18	5,22
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,66	93,21	1,07

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

$1 \geq$ = efisien

$1 <$ = tidak efisien

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (Dua) sasaran semuanya tidak efisien hal ini ditunjukkan dengan nilai efisiensi yang diperoleh kurang dari 1 (satu).

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah memperoleh pencapaian:

1. Kesuksesan Penyelenggaraan "Bazar Blitar Djadoel 2025"
2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tinggi
3. Optimalisasi sarana perdagangan (pasar daerah)

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan **Good Governance**. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2025 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan rata-rata baik. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan

a. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan volume usaha perdagangan

Target	2,5%
Realisasi	9,02%
Capaian Kinerja	360,8%

Selama tahun 2025 peningkatan volume usaha perdagangan terjadi peningkatan sehingga target terealisasi 9,02 % dengan capaian sebesar 360,8 %. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Sasaran II

Meningkatnya produktivitas industri

b. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan produktivitas industri

Target	2 %
Realisasi	8,90 %
Capaian Kinerja	445 %

Selama tahun 2025 peningkatan produktivitas industri juga mengalami peningkatan sehingga target terrealisasi 8,90% dengan capaian kinerja sebesar 445 % sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**

3. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Target nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 86,05 realisasi 85,76 Nilai realisasi ini menunjukkan indikator kinerja sasaran **Sangat Berhasil**

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi ramai lagi
- f. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang
- g. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI
- h. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan revitalisasi pasar legi.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan		√	√	√
2	Terlaksananya pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan		√	√	√
3	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan	Melaksanakan pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan		√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	/koordinasi dengan OPD terkait	dengan OPD terkait	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan pemberdayaan sarana distribusi perdagangan				
4	Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegehan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegehan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan		√	√	√
5	Mengadakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi ramai lagi	Melaksanakan kegiatan GEMPAR “Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar” sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan		√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
6	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan memberikan bantuan peralatan produksi	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan juga tetap memberikan bantuan peralatan produksi	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -		√	√	√
7	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan		√	√	√

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	IUI		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				
8	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		√	√	√

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 26 Februari 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar



PARMINTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197106121993011001

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

TAHUN 2021-2026

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2025				2020	2025			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n – nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1}} x 100 %	23,55 %	24,9 %	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1}} x 100 %	1,5%	2,5%	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital Optimalisasi pengawasan perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
										Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	
											Program Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
											Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)	
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{(nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1}} x 100 %	9,75 %	9,95 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	{{(produktivitas industry tahun n – produktivitas Industry tahun (n-1))/ produktivitas Industry tahun (n-1}} x 100 %	-3,17%	2 %	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM Peningkatan pemasaran hasil industry Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah N	A (82,8)	A (86,05)			

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	24,9	
						Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	[(Volume Usaha Perdagangan tahun n - Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1))/ Volume Usaha Perdagangan tahun (n-1)] x 100 %	%	2,5	
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	%	73,5	32.716.886.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	03	2	01		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	{Jumlah bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik/ Jumlah bangunan pasar rakyat yang ada} x 100 %	%	80	31.625.000.000
3	30	03	2	01	01	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan pada tahun n	unit	8	15.812.500.000
3	30	03	2	01	02	Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun n	unit	9	15.812.500.000
3	30	03	2	02		Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	(Jumlah usaha perdngangan yang dibina / jumlah usaha perdagangan) x 100%	%	6	1.091.886.000
3	30	03	2	02	01	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	03	2	02	02	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	(Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan / Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang ada) x 100%	%	100	291.500.000
3	30	04	2	01		Keg.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	(Jumlah barang penting yang diawasi / jumlah barang penting yang harus diawasi) x 100%	%	100	90.500.000
3	30	04	2	01	01	Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat pada tahun n	laporan	2	90.500.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	04	2	02		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	(jumlah harga dan stok barang yang diawasi / jumlah harga dan stok barang yang harus diawasi) x 100%	%	100	110.500.000
3	30	04	2	02	01	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah hasil dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada tahun n	laporan	3	110.500.000
3	30	04	2	03		Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	(Jumlah pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi / jumlah pedagang pupuk dan pestisida yang ada) x 100%	%	100	90.500.000
3	30	04	2	03	02	Sub.Keg. Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah hasil pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	2	90.500.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	%	50	709.696.500
3	30	06	2	01		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n	unit	6000	709.696.500
3	30	06	2	01	01	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n	unit	5900	291.977.000
3	30	06	2	01	02	Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina pada tahun n	orang	300	417.719.500
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,91	
						Sasaran : Meningkatkan produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	[(Produktivitas industri tahun n - Produktivitas industri tahun (n-1))] /produktivitas industry tahun (n-1))] x 100%	%	2	

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{(Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1))/Jumlah IKM tahun (n-1)} x 100 %	%	5	2.430.225.000
3	31	02	2	01		Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	(Jumlah IKM yang dibina / Jumlah IKM) x 100%	%	5	2.430.225.000
3	31	02	2	01	02	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada tahun n	dokumen	4	500.850.000
3	31	02	2	01	05	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada tahun n	dokumen	5	1.600.375.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
						Sub.Keg.Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry pada tahun n	dokumen	5	329.000.000
						Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A (82)	
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n	%	81,5	9.108.329.988
1	06	01	2	01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar tahun n / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus disusun tahun n) x 100 %	%	100	18.973.000
1	06	01	2	01	01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tahun n	dokumen	10	10.628.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	01	06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun n	laporan	8	8.345.000
1	06	01	2	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	7.593.520.388
1	06	01	2	02	01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada Tahun berjalan	orang	60	7.586.617.888
1	06	01	2	02	02	Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	6.502.500
1	06	01	2	05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	231.525.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	05	02	Sub keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pada tahun berjalan	paket	5	98.500.000
1	06	01	2	05	10	Sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan	orang	300	133.025.000
1	06	01	2	06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	100	436.733.600
1	06	01	2	06	01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	11	12.850.000
1	06	01	2	06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	4	76.476.750
1	06	01	2	06	03	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	paket	7	51.773.400

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	06	04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	15	115.015.000
1	06	01	2	06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan pada tahun berjalan	paket	6	44.100.000
1	06	01	2	06	06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	dokumen	36	8.612.700
1	06	01	2	06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	127.905.750
1	06	01	2	07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	(Jumlah BMD yang tersedia sesuai standart/Jumlah BMD yang harus disediakan)x 100%	%	100	300.900.000
1	06	01	2	07	11	Sub Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	300.900.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	80.000.000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	8.000.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	30.000.000
1	06	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standart / Jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	401.600.000
1	06	01	2	08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	laporan	48	201.600.000
1	06	01	2	08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	200.000.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar tahun n / jumlah BMD yang harus dipelihara tahun n) x 100 %	%	100	125.078.000
1	06	01	2	09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaterpelihara pada tahun berjalan	unit	13	33.424.000
2	23	01	2	09	00 05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	2	7.500.000
1	06	01	2	09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	unit	4	18.000.000
1	06	01	2	09	09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	46.420.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	09	11	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	5	27.234.000

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
: 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1)} x 100 %	2,5 %	9,02%	360,8%		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.355.235.454	4.943.249.059	92,31	
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	202.713.400	193.318.359	95,37	
								Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	107040900	106514900	99,51	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	{{(produktivitas Industry tahun n – produkkktivitas Industry tahun (n-1))/ produktivitas Industry tahun (n-1}} x 100 %	2%	8,90%	445%		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.548.677.514	3.022.927.547	85,18	
								Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	8.115.355.146	7.564.072.928	93,21	

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PARMINTO,S.Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.
Jabatan : Walikota Blitar
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA
Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

PEMERINTAH KOTA BLITAR
Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar,
PARMINTO,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197106121993011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	9.91(%)
2	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24.90(%)
3	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	2.00(%)
4	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2.25(%)
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.05(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	107,040,900.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	202,713,400.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5,355,235,454.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3,548,677,514.00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,115,355,146.00	Dana Alokasi Umum (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		17,329,022,414.00	

Wakil Kota Blitar,

SYAUFUL MUHRIBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar,

PARMINTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197106121993011001